

**FINANCIAL COMPENSATION IN SAND MINING: A CASE STUDY IN THE
DOWNSTREAM OF THE KOKOK TENGG EK RIVER**

**KOMPENSASI FINANSIAL DALAM PENAMBANGAN PASIR: STUDI KASUS
DI HILIR SUNGAI KOKOK TENGG EK**

Ahmad Dani Febriadi¹, Diswandi²

Universitas Mataram^{1,2}

ahmaddanifebriadi@gmail.com¹, diswandi@unram.ac.id²

ABSTRACT

Sand mining is the process of extracting sand from nature, whether from rivers, beaches, seas, or open pit mines, to be used as raw material in various industries. While sand mining provides economic benefits such as the provision of construction materials and increased community income, it also has negative impacts on the environment and the welfare of local communities. Therefore, compensation is one of the solutions for those affected by sand mining activities. This research examines several variables that influence the acceptance of compensation for the impact of sand mining using Kalijaga Timur Village and Kalijaga Baru Village in East Lombok as case studies. The Contingent Valuation Method (CVM) was applied to determine the community's average Willingness to Accept (WTA), which was set at IDR 337,500 per month. The results showed that factors such as environmental awareness, income, and age of the respondents significantly influenced the expected compensation amount.

Keywords: Sand mining, Willingness to Accept (WTA), Contingent Valuation Method (CVM).

ABSTRAK

Penambangan pasir adalah proses pengambilan pasir dari alam, baik dari sungai, pantai, laut, maupun tambang terbuka, untuk digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri. Meskipun penambangan pasir memberikan manfaat ekonomi seperti penyediaan bahan konstruksi dan peningkatan pendapatan masyarakat, kegiatan ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kompensasi menjadi salah satu solusi bagi mereka yang terdampak oleh aktivitas penambangan pasir. Penelitian ini mengkaji beberapa variabel yang mempengaruhi penerimaan kompensasi atas dampak penambangan pasir dengan menggunakan Desa Kalijaga Timur dan Desa Kalijaga Baru di Lombok Timur sebagai studi kasus. Metode Contingent Valuation Method (CVM) diterapkan untuk menentukan rata-rata kesediaan menerima (Willingness to Accept/WTA) masyarakat, yang ditetapkan sebesar Rp 337.500 per bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran lingkungan, pendapatan, dan usia responden secara signifikan mempengaruhi besaran kompensasi yang diharapkan.

Kata Kunci: Penambangan pasir, Willingness to Accept (WTA), Contingent Valuation Method (CVM).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor mineral bukan logam dan batuan, yang tersebar di hampir seluruh wilayah negara. Potensi ini mencakup berbagai jenis mineral yang dapat dimanfaatkan untuk industri konstruksi, keramik, serta bahan baku industri lainnya [1]. Di antaranya, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur dengan cadangan sekitar 4,36 miliar ton batu gamping, sementara Sumatera Barat diperkirakan memiliki sekitar 12,75 miliar ton batu kapur (limestone). Sumatera Selatan tercatat

memproduksi 1.394,31 ribu ton batu kapur pada tahun 2014. Selain itu, Kepulauan Riau, Jawa Tengah dengan cadangan batu gamping sekitar 12,75 miliar ton, dan Yogyakarta, yang memiliki cadangan batu gamping sekitar 17.492.706.780 m³, juga menyumbangkan potensi besar. Dengan cadangan yang melimpah ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan pemanfaatan mineral non-logam dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor industri nasional [2].

Pertambangan pasir merupakan salah satu industri penambangan bahan galian mineral non-logam yang semakin berkembang, seiring dengan tingginya permintaan terhadap pasir untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, industri konstruksi, dan kebutuhan lainnya. Kegiatan ini telah mendorong masyarakat untuk menggali dan mengeksplorasi bahan galian jenis pasir sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan [3]. Meskipun demikian, maraknya penambangan ilegal yang tidak dilengkapi dengan izin resmi dan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan menyebabkan dampak negatif yang serius. Praktik penambangan ilegal ini sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan [4].

Penambangan pasir yang dilakukan secara masif dan tidak terkendali telah menyebabkan degradasi lingkungan dan kerusakan infrastruktur di sekitar area penambangan [5]. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain berupa peningkatan debu yang mencemari udara, kerusakan jalan raya akibat beban berat kendaraan tambang, serta kekeringan yang terjadi akibat hilangnya area resapan air [6]. Selain itu, kegiatan ini juga menyebabkan banjir rob yang parah saat hujan deras, serta penyumbatan saluran irigasi yang mengganggu sistem pengairan pertanian [7]. Untuk mengurangi dampak-dampak tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai willingness to accept (WTA), yaitu pengukuran sejauh mana masyarakat bersedia menerima kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Kajian ini dapat digunakan untuk mengestimasi dana kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas penambangan pasir, sehingga memberikan solusi yang berkelanjutan dan mengurangi

ketimpangan sosial akibat kerusakan lingkungan [8].

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun pada umumnya masyarakat cenderung menolak pembukaan tambang, terutama jika proyek tersebut menyebabkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan, mereka akan lebih terbuka untuk menerima keberlanjutan kegiatan tersebut jika ada jaminan kompensasi yang sesuai [9], [10]. Kesiadaan ini sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas kompensasi yang ditawarkan, serta upaya nyata untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan mengurangi dampak pencemaran [11]. Masyarakat juga lebih cenderung menerima kompensasi finansial sebagai ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan [12], terutama jika mereka memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi mengenai bahaya penambangan dan dampaknya terhadap kesehatan serta kualitas hidup mereka [13]. Faktor-faktor ini menjadi penentu utama dalam keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kompensasi yang diajukan.

Penambangan galian C di Kecamatan Lenek, khususnya di Desa Kalijaga Baru dan Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, telah menjadi sorotan karena aktivitasnya yang masif dan eksploitatif, mayoritas di antaranya adalah tambang ilegal yang memanfaatkan aliran Sungai Kokok Tenggek dan melanggar peraturan yang ada. Meskipun Pemerintah Provinsi NTB telah menutup tambang ilegal dan melakukan evaluasi terhadap tambang legal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dampak negatif yang ditimbulkan, terutama dalam hal kerusakan lingkungan, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat, tidak dapat diabaikan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ini sangat mempengaruhi sumber penghidupan masyarakat, khususnya di

sektor pertanian, dengan penurunan kualitas air dan udara, lahan pertanian yang tidak produktif, irigasi tersumbat, serta penurunan hasil panen kelapa. Selain itu, air keruh menyebabkan rumah ibadah tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan kesehatan anak-anak terganggu akibat paparan debu yang intens. Sumur warga juga mengering akibat pori-pori tanah tertutup lumpur. Penolakan masyarakat terhadap tambang ilegal mencerminkan keresahan mereka akan dampak yang mereka alami tanpa adanya kompensasi yang memadai [14]. Meskipun sejumlah penelitian terkait Willingness to Accept (WTA) telah dilakukan dalam konteks penambangan, kajian yang secara khusus mengukur WTA masyarakat terdampak oleh penambangan pasir ilegal di daerah seperti Desa Kalijaga Baru dan Desa Kalijaga, Lombok Timur, masih sangat terbatas.

Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan Willingness to Pay (WTP), yang lebih fokus pada kemampuan masyarakat untuk berkontribusi. Namun, dalam konteks kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan, pendekatan WTA lebih relevan karena dapat membantu merumuskan kompensasi yang adil dan sesuai bagi masyarakat terdampak [15]. WTA merupakan salah satu metode dalam Contingent Valuation Method (CVM), yang digunakan untuk menilai nilai ekonomi dari suatu sumber daya alam. CVM seringkali menggunakan survey WTP untuk mengukur sisi permintaan, yakni berapa banyak masyarakat bersedia membayar untuk mendapatkan manfaat atau melestarikan sumber daya alam tersebut. Di sisi lain, CVM juga bisa diterapkan melalui WTA untuk mengukur berapa besar kompensasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menerima kerugian atau dampak negatif, seperti kerusakan

lingkungan akibat kegiatan penambangan [16].

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada sektor pertambangan lainnya atau aktivitas penambangan yang legal, sementara dampak destruktif dari penambangan pasir ilegal, khususnya dalam bentuk kerusakan lingkungan dan infrastruktur, belum banyak diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji respons masyarakat terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan pasir ilegal, serta untuk mengidentifikasi tingkat kesediaan mereka untuk menerima kompensasi yang dianggap layak. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami WTA di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang unik, sekaligus menjadi dasar untuk merancang kebijakan kompensasi yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Introduction contains brief and concise research backgrounds, and objectives. Theoretical support is included in this section, similar research that has been done can be stated.

KAJIAN PUSTAKA

Penambangan Pasir dan Dampaknya

Penambangan pasir merupakan kegiatan ekstraktif yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan industri konstruksi [17]. Pasir digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan beton, mortar, dan material konstruksi lainnya. Namun, aktivitas ini tidak tanpa dampak negatif. Menurut [17], penambangan pasir secara berlebihan dapat menyebabkan degradasi ekosistem, erosi pantai, dan penurunan kualitas air di sekitar lokasi tambang. Di Indonesia, khususnya di daerah Lombok Timur, penambangan pasir telah menyebabkan perubahan morfologi sungai dan pantai,

yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat [18].

Kompensasi sebagai Solusi Dampak Negatif

Untuk mengatasi dampak negatif penambangan pasir, kompensasi menjadi salah satu solusi yang diimplementasikan. Kompensasi bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak serta meminimalisir kerugian ekonomi dan sosial. Menurut [8], kompensasi yang efektif harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat diterima oleh masyarakat. Studi oleh [19] menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan secara adil dan transparan dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penambangan, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Metode Contingent Valuation Method (CVM) dalam Penilaian Kompensasi

Metode Contingent Valuation Method (CVM) sering digunakan untuk mengukur nilai ekonomi yang diharapkan oleh masyarakat sebagai kompensasi atas dampak negatif suatu kegiatan. Menurut [10], CVM memungkinkan peneliti untuk mengestimasi Willingness to Accept (WTA) atau kesediaan menerima kompensasi dari responden. Dalam konteks penambangan pasir di Lombok Timur, penggunaan CVM membantu menentukan besaran kompensasi yang realistis dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran lingkungan, pendapatan, dan usia responden memiliki pengaruh signifikan terhadap WTA, sejalan dengan temuan sebelumnya oleh [8].

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Kompensasi

Beberapa studi telah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan kompensasi oleh masyarakat. Menurut [20], tingkat pendidikan, usia, dan pendapatan juga memainkan peran penting dalam menentukan besaran kompensasi yang diharapkan. Selain itu, faktor sosial seperti hubungan antar individu dan kepercayaan terhadap pengelola tambang turut mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menerima kompensasi [21]. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek tersebut diperlukan dalam merumuskan kebijakan kompensasi yang efektif.

Pengelolaan Berkelanjutan dalam Penambangan Pasir

Pengelolaan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari penambangan pasir dapat dinikmati tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Menurut [22], implementasi praktik penambangan yang ramah lingkungan, seperti rehabilitasi lahan pasca-tambang dan penggunaan teknologi rendah dampak, dapat mengurangi efek negatif terhadap ekosistem. Di Lombok Timur, penerapan pengelolaan berkelanjutan diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan, sesuai dengan rekomendasi dari berbagai penelitian sebelumnya [23].

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Lenek, dan Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan fokus pada

pendekatan kuantitatif [24]. Lokasi penelitian secara administratif dilakukan di Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Lenek, dan Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, selain karena potensi sumber daya alam yang ada, juga sebagai kawasan yang rawan terdampak oleh aktivitas penambangan galian C ilegal.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi nilai Willingness to Accept (WTA) dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang terlibat. Fungsi persamaan yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi WTA adalah sebagai berikut:

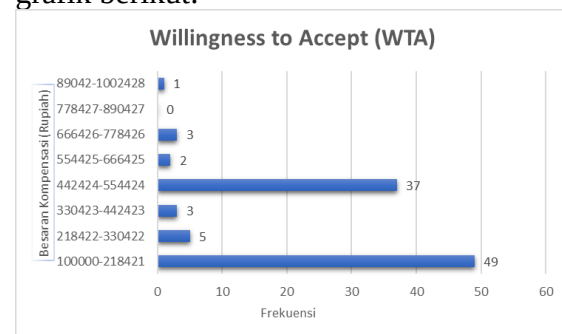
$$\text{WTA} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pendapatan} + \beta_2 \text{Persepsi} + \beta_3 \text{Tingkat Pendidikan} + \beta_4 \text{Usia} + \beta_5 \text{Ukuran keluarga} + \epsilon$$

Dimana Willingness to Accept (WTA) adalah konsep ekonomi yang menggambarkan jumlah kompensasi finansial yang bersedia diterima seseorang untuk menerima suatu kerugian atau perubahan negatif dalam keadaan atau lingkungan mereka. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan mata uang Indonesia (rupiah) sebagai satuan. Usia diukur berdasarkan waktu yang telah berlalu sejak seseorang dilahirkan, yang menggambarkan durasi hidup individu. Pendidikan merujuk pada proses formal dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pemahaman, yang diukur dengan menghitung jumlah tahun sekolah yang telah dijalani responden. Pendapatan mencakup total

ekonomi yang diterima oleh individu, keluarga, atau entitas lainnya dari berbagai sumber selama periode satu bulan, dihitung dalam rupiah. Sedangkan persepsi terhadap dampak lingkungan menggambarkan pandangan atau penilaian individu terhadap kerusakan atau perubahan lingkungan, yang diukur dengan menggunakan skala 1 hingga 5, dengan 1 menunjukkan pandangan yang kurang peka terhadap dampak dan 5 menunjukkan pandangan yang sangat peka terhadap dampak tersebut. Ukuran keluarga diukur berdasarkan jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga, baik keluarga inti maupun keluarga besar, yang dapat memengaruhi keputusan dan persepsi individu terhadap WTA.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

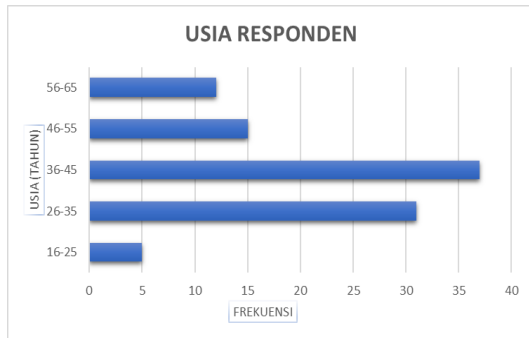
Karakteristik responden dijelaskan grafik berikut:



Gambar 1. Grafik Hasil Tabulasi data WTA

Sumber: Data diolah penulis, 2025

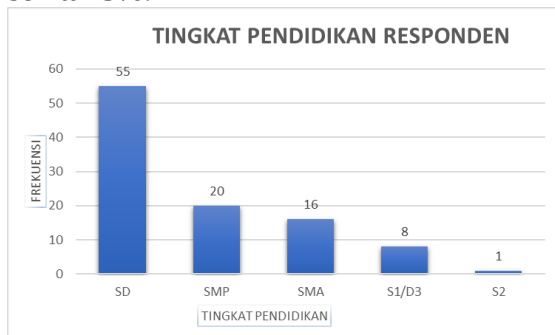
Willingness to Accept menggambarkan sejauh mana individu dalam sampel bersedia menerima kompensasi atas dampak yang diterima oleh aktivitas penambangan pasir. Mayoritas responden bersedia menerima kompensasi paling tinggi adalah Rp. 1.000.000 dan paling rendah adalah Rp. 100.000. rata rata responden mau menerima kompensasi sejumlah Rp. 337.500



Gambar 2. Grafik Hasil Tabulasi data Usia

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Mayoritas sample Masyarakat yang tinggal di desa Kalijaga Timur dan desa Kalijaga Baru berusia 36-45 tahun sebanyak 37 orang atau sekitar 37%, diurutkan kedua yaitu mereka yang berusia 26-35 tahun sebanyak 31 orang atau sekitar 31%, diurutkan ketiga yaitu mereka yang berusia 46-55 tahun sebanyak 15 orang atau sekitar 15%, kemudian urutan keempat yaitu sebesar 12 orang yang berusia 56-65 tahun atau sekitar 12%, sedangkan mereka yang berusia 16-25 tahun paling sedikit yaitu sebanyak 5 orang atau sekitar 5%.



Gambar 3. Grafik Hasil Tabulasi data Tingkat Pendidikan

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Pendidikan Mayoritas sample Masyarakat yang tinggal di desa Kalijaga Timur dan desa Kalijaga Baru diukur dari lama sekolah responden. Responden yang mendominasi menempuh Pendidikan 6 tahun atau setara Sekolah dasar 55%, kemudian diurutkan kedua yang menempuh Pendidikan 9 tahun atau setara sekolah menengah pertama 20%, selanjutnya

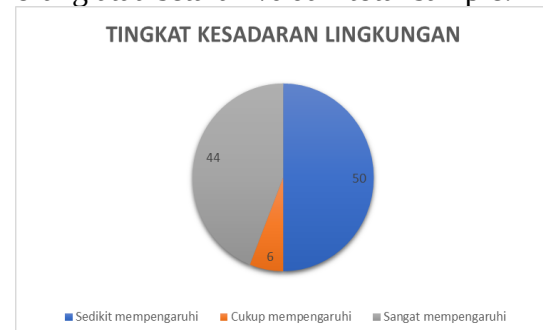
diurutkan ketiga adalah responden yang menempuh Pendidikan 12 tahun atau setara sekolah menengah atas 16%, keempat adalah yang menempuh Pendidikan 16 tahun setara D3-S1 8%, dan yang paling sedikit adalah yang menempuh Pendidikan 18 tahun atau setara S2 1%.



Gambar 4. Grafik Hasil Tabulasi data Pendapatan

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Pendapatan dalam sample data ini didasarkan pada kisaran bulanan. Kisaran pendapatan Masyarakat yang paling tinggi adalah Rp. 1.000.001 hingga 2.500.000 atau sekitar 50% dari total sample, kelompok pendapatan lainnya memiliki persentase yang lebih rendah yaitu pendapatan antara Rp. 2.500.001 hingga 5.000.000 sebanyak 24 orang atau sekitar 24% dari total sample, sedangkan kelompok pendapatan Rp. 0 hingga Rp. 1.000.000 sebanyak 22 orang atau setara 22% dari total sample, dan kelompok pendapatan antara Rp. 5.000.001 hingga 7.500.00 sebanyak 4 orang atau setara 4% dari total sample.



Gambar 5. Grafik Hasil Tabulasi data Tingkat Kesadaran Lingkungan

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Tingkat tanggapan responden terhadap dampak lingkungan akibat tambang pasir adalah mereka menganggap tambang pasir sedikit mempengaruhi sangat penting sebanyak 50 orang atau 50%. Selanjutnya menganggap tambang pasir sangat mempengaruhi sebanyak 44 orang atau 44%. Kemudian yang terakhir menganggap cukup mempengaruhi sebanyak 6 orang atau 6% dari total sampel.



Gambar 6. Grafik Hasil Tabulasi data Jumlah Anggota Keluarga

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Jumlah anggota keluarga Mayoritas sample Masyarakat yang tinggal di desa Kalijaga Timur dan desa Kalijaga Baru diukur diukur berdasarkan jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga. Responden yang mendominasi beranggota keluarga 4 orang sebanyak 41 orang atau setara 41% dari total sample, kemudian diurutkan kedua yang beranggota keluarga 3 orang sebanyak 28 orang atau setara 28%, selanjutnya diurutkan ketiga adalah responden yang beranggota keluarga 5 orang sebanyak 17 orang atau setara 17%, keempat adalah responden yang beranggota keluarga 2 orang sebanyak 8 orang atau setara 8%, kelima responden yang beranggota keluarga 6 orang sebanyak 4 orang atau setara 4% dan yang paling sedikit adalah responden yang beranggota keluarga 7 orang sebanyak 2 orang atau setara 2% dari total sample.

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Statistic t	P Value
pendapatan	-.0193	-2.88	0.005
Tingkat pendidikan	5736.794	0.79	0.432
Tingkat Kesadaran Lingkungan	152923.7	14.98	0.000
Usia	1837.947	2.70	0.008
Jumlah keluarga	319.9146	0.05	0.963
Cons	-307822.7	-4.62	0.000
F-statistik			123.47
R-kuadrat			0.8679

Dari hasil di atas, kami dapat menggambarkan situasi berikut:

Setiap kenaikan satu rupiah pada pendapatan diharapkan mengurangi WTA sebesar Rp 0,0193. Hubungan ini bersifat negatif dan signifikan karena nilai variabel sebesar 0,005 lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05. Artinya, semakin tinggi pendapatan, semakin rendah tingkat WTA. Penurunan ini disebabkan oleh persepsi responden bahwa apabila pendapatan mereka sudah memadai atau kesejahteraan meningkat, mereka merasa orang dengan pendapatan lebih rendah lebih berhak menerima WTA yang tinggi. Pendapat ini didukung oleh [25], [26] yang menyatakan bahwa Pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap WTA.

Tingkat pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap WTA, karena nilai variabel lebih besar dari 0.05 (batas signifikansi umum). Meskipun koefisiennya positif, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Pendapat ini didukung oleh [15] yang menyatakan bahwa tingkat Pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap WTA, sedangkan menurut [20], variabel pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan menerima kompensasi.

Kesadaran lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap WTA (Willingness to Accept). Hal ini ditunjukkan oleh nilai variabel sebesar 0,000, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak terjadi secara kebetulan. Setiap peningkatan tingkat persepsi lingkungan diperkirakan akan meningkatkan WTA sebesar Rp. 152.923,7. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran lingkungan individu terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang pasir, semakin besar pula kesiapan mereka untuk menerima kompensasi. Pengaruh yang kuat ini mengindikasikan bahwa persepsi individu mengenai dampak lingkungan memainkan peran penting dalam menentukan besaran kompensasi yang mereka anggap pantas. Pendapat ini didukung oleh [21] yang menyatakan bahwa Kesadaran lingkungan memiliki korelasi positif yang kuat dengan Kemauan Menerima (WTA), dan mereka yang lebih mementingkan perlindungan lingkungan di atas pembangunan ekonomi memerlukan kompensasi yang lebih tinggi.

Usia memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap WTA, karena nilai variabel ini sebesar (0,008) lebih kecil dari ambang batas signifikan. Setiap kenaikan 1 tahun pada usia diperkirakan akan meningkatkan WTA sebesar Rp. 1837.947. Ini mengindikasikan bahwa individu yang lebih tua lebih cenderung untuk menerima kompensasi lebih besar untuk dampak lingkungan, pendapat ini didukung oleh [27] yang menyatakan bahwa usia memiliki pengaruh signifikan terhadap WTA.

Jumlah anggota keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap WTA karena nilai variabel yang sangat tinggi 0,963. Ini menunjukkan bahwa ukuran keluarga

tidak mempengaruhi kesiapan responden untuk menerima kompensasi terkait dampak lingkungan dari tambang pasir, Pendapat ini didukung oleh [28] yang menyatakan bahwa jumlah keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap WTA, sedangkan menurut [10], [20] variabel jumlah keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan menerima kompensasi.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,8679, yaitu sekitar 86,79% dari variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model. Nilai P value untuk F-statistic sebesar 123.47 lebih rendah dari tingkat signifikansi keseluruhan 0.05, yang mengindikasikan bahwa keseluruhan model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pembahasan menjabarkan hasil dari penerapan metode untuk menjawab tujuan perancangan. Bentuknya dapat berupa konsep-konsep perancangan yang menjawab permasalahan perancangan. Bagian ini dapat dilengkapi dengan ilustrasi zoning, utilitas, dsb yang mendukung penjelasan konsep perancangan.

Bagian pembahasan dan pendahuluan merupakan bagian yang memiliki proporsi pembahasan paling banyak. Hal ini berkaitan dengan banyaknya hal - hal yang perlu dijelaskan pada kedua bagian tersebut.

Perlu dipahami bahwa jurnal berbeda dengan laporan perancangan. Intisari jurnal adalah proses menemukan permasalahan hingga menemukan solusi bagi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, denah tampak potongan tidak dicantumkan. Gambar detail bisa dicantumkan dalam kasus khusus yang bertujuan untuk menjawab permasalahan misalnya detail struktur atau eskterior. Selain itu, hal-hal yang tidak relevan tidak perlu dicantumkan karena kapasitas jurnal terbatas untuk

menjelaskan hal-hal yang dinilai tidak relevan.

PENUTUP

Kesimpulan

Studi ini mengungkapkan bahwa nilai kompensasi yang diharapkan oleh masyarakat di Desa Kalijaga Timur dan Desa Kalijaga Baru akibat dampak negatif dari penambangan pasir adalah sebesar rata-rata Rp. 337.500 per bulan, yang diukur menggunakan metode Willingness to Accept (WTA). Pengukuran ini menunjukkan bahwa pendapatan, kesadaran lingkungan, dan usia memiliki dampak yang signifikan terhadap angka kompensasi tersebut. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini menyarankan beberapa langkah strategis, antara lain perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, penegakan regulasi yang lebih ketat guna mengendalikan aktivitas penambangan pasir, monitoring berkelanjutan untuk memastikan dampak lingkungan tetap terpantau dan dikelola dengan baik, diversifikasi mata pencaharian agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada penambangan pasir, serta pelaksanaan program edukasi guna meningkatkan kesadaran lingkungan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan. Implementasi dari saran-saran ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif penambangan pasir serta meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan di kedua desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. A. P. Lestari, B. H. Widayanti, and Y. I. Mahendra, "Suitability analysis of non-metallic minerals and rock mining sites with spatial patterns based on regional spatial planning in Central Lombok Regency," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2020. doi: 10.1088/1755-1315/413/1/012020.
- [2] Validnews, "Menakar Potensi Cadangan Batuan Mineral," validnews.id. Accessed: Nov. 30, 2024. [Online]. Available: <https://validnews.id/ekonomi/Menakar-Potensi-Cadangan-Batuan-Mineral-fjv>
- [3] H. S. Dara Kospa, A. Rosantika, and Z. Mutaqin, "Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial - Ekonomi, Fisik Dan Keluhan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Kasih Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir)," *Jurnal Tekno Global UGM Fakultas Teknik*, vol. 10, no. 2, 2021, doi: 10.36982/jtg.v10i2.1909.
- [4] S. Syahnur and Y. Diantimala, "'Surviving and growing up with illegal status': The analysis of Socio-Economic household, potential conflict, the environmental damage, and vulnerability of local community to disaster," *Journal of Sustainable Mining*, vol. 20, no. 3, 2021, doi: 10.46873/2300-3960.1061.
- [5] A. K. Syaifulloh, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.18196/jphk.v2i2.9990.
- [6] F. Andriawan *et al.*, "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District)," 2021. doi: doi.org/10.35912/jihham.v1i1.414.

- [7] A. Arjan, A. N. Afifah, Y. A. Patila, and A. V. Anas, "Valuation of Environmental Impact Due to Material Construction Mining, Gowa, South Sulawesi," *EPI International Journal of Engineering*, vol. 3, no. 1, 2020, doi: 10.25042/epi-ije.022020.13.
- [8] R. Widyantari and R. Harini, "Financial and ecological compensation based on willingness to accept in sand mining of Progo River downstream," in *E3S Web of Conferences*, 2020. doi: 10.1051/e3sconf/202020002010.
- [9] E. Crespo-Cebada, C. Díaz-Caro, M. T. N. Gil, and Á. S. M. Sanguino, "Does water pollution influence willingness to accept the installation of a mine near a city? Case study of an open-pit lithium mine," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 12, no. 24, 2020, doi: 10.3390/su122410377.
- [10] M. Ya Muhaemin and C. Chamid, "Kajian Pendekatan Willingness To Accept terhadap Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Andesit di Desa Lagadar," *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, vol. 2, no. 2, 2022, doi: 10.29313/bcsurp.v2i2.3667.
- [11] A. T. Tunggadewi and U. U. Akbar, "ANALISIS WILLINGNESS TO ACCEPT DANA KOMPENSASI MASYARAKAT SEKITAR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) CIPEUCANG," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, vol. 11, no. 2, 2023, doi: 10.37081/ed.v11i2.4644.
- [12] H. Sani, R. N. S. Tui, Syamsuddin, and G. A. P. Alhabsyi, "Analisis Ekonomi Lingkungan Menggunakan Willingness To Accept Dana Kompensasi Penambangan Kabupaten Enrekang," *Jurnal Teknik AMATA*, vol. 3, no. 2, pp. 81–86, Dec. 2022, doi: 10.55334/jtam.v3i2.310.
- [13] M. Akbar, Z. Said, and Rusnaena, "IMPLIKASI PENAMBANGAN PASIR DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADAIDI KAB. PINRANG," *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 2, 2020, doi: 10.35905/banco.v1i2.1304.
- [14] Lombok Post, "Banyak Galian C Ilegal di Lombok Timur, Harus Ada Tindakan Tegas: Pj Gubernur." Accessed: Nov. 24, 2024. [Online]. Available: <https://lombokpost.jawapos.com/n tb/1505280000/banyak-galian-c-ilegal-di-lombok-timur-harus-ada-tindakan-tegas-pj-gubernur>
- [15] D. Diswandi, L. Fadliyanti, M. Afifi, H. Hailuddin, and A. Tauristina, "The Willingness of Fishermen Households to Accept Coral Reef Conservation in Order to Support Sustainable Marine Tourism in Gili Matra, Indonesia," in *Proceedings of the 3rd Annual Conference of Education and Social Sciences (ACCESS 2021)*, Atlantis Press SARL, 2023, pp. 285–292. doi: 10.2991/978-2-494069-21-3_31.
- [16] R. T. Carson and W. M. Hanemann, "Chapter 17 Contingent Valuation," in *Handbook of Environmental Economics*, vol. 2, K.-G. Mäler and J. R. Vincent, Eds., Amsterdam: Elsevier, 2005, pp. 821–936. doi: 10.1016/S1574-0099(05)02017-6.

- [17] G. S. de Souza *et al.*, “Mining for sand extraction - Rio Grande: Brazilian environmental legislation applied,” *Revista de Gestão e Secretariado*, vol. 14, no. 12, pp. 21018–21031, Dec. 2023, doi: 10.7769/gesec.v14i12.3146.
- [18] A. Al Idrus, L. Ilhamdi, I. G. Mertha, LL. Abd. M. Abidin, and L. Yaqutunnafis, “Konservasi Sumberdaya Alam Berwawasan Kearifan Lokal Melalui Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Pada Masyarakat Desa Bagik Payung Timur, Lombok Timur,” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, vol. 4, no. 3, 2021, doi: 10.29303/jpmipi.v4i3.996.
- [19] K. Su *et al.*, “The establishment of a cross-regional differentiated ecological compensation scheme based on the benefit areas and benefit levels of sand-stabilization ecosystem service,” *J Clean Prod*, vol. 270, p. 122490, Oct. 2020, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2020.122490.
- [20] I. N. R. Ndoen, A. A. Nalle, F. L. Benu, A. Kampus, J. Adisucipto, and N. Tenggara Timur, “Valuasi Ekologi dan Ekonomi Sumber Air Bonleu Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Metode Willingness to Accept,” 2024, doi: 10.58192/populer.v3i4.2824.
- [21] Z. Deh-Haghi, A. Bagheri, C. A. Damalas, and Z. Fotourehchi, “Horticultural products irrigated with treated sewage: are they acceptable?,” *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 28, no. 38, 2021, doi: 10.1007/s11356-021-14552-8.
- [22] B. Matovu, J. L. Sebadduka, E. Nuwategeka, and Y. Bbira, “The Complexity of Sand Mining in Coastal Regions of India: Implications on Livelihoods, Marine and Riverine Environment, Sustainable Development, and Governance,” *KMI International Journal of Maritime Affairs and Fisheries*, 2024, [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268300920>
- [23] T. Haq, N. Hanani, Marjono, and Moh. Khusaini, “Sustainable Environmental Recovery Policy: Redesigning Sand Mining Policy in Indonesia,” *Journal of Law and Sustainable Development*, 2023, [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:262193743>
- [24] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, 2011.
- [25] Y. Erfrissadona and I. Setiawan, “VALUASI EKONOMI LINGKUNGAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN (Suatu Kasus di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat) ENVIRONMENTAL ECONOMIC VALUATION DUE TO AGRICULTURAL LAND-USE CHANGE (A Case in Tasikmalaya City, Jawa Barat).” doi: <https://doi.org/10.19184/jsep.v13i1.15784>.
- [26] A. H. Rotteveel, M. S. Lambooij, N. P. A. Zuithoff, J. van Exel, K. G. M. Moons, and G. A. de Wit, “Valuing Healthcare Goods and Services: A Systematic Review and Meta-Analysis on the WTA-WTP Disparity,” May 01, 2020, *Adis*. doi: 10.1007/s40273-020-00890-x.
- [27] L. N. Rohmah, G. Yulianto, M. M. Kamal, L. Adrianto, and H. Booth,

“Insentif dan Disinsentif Ekonomi pada Perlindungan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) sebagai Tangkapan Sampingan di Aceh Jaya,” *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, vol. 9, no. 2, 2023, doi: 10.15578/marina.v9i2.12547.

- [28] S. Herwanti, “KESEDIAAN MASYARAKAT MENERIMA PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN AIR: KASUS DAS WAY SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS,” *Gorontalo Journal of Forestry Research*, vol. 3, no. 1, 2020, doi: 10.32662/gjfr.v3i1.1052.